



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Desi Ratna Sari¹, Rani Anggriani², Restu Zebua³, Sylvia Maria Pasaribu⁴, Yediza Saputrinta⁵

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
desisari7923@gmail.com¹, ranianggriani417@gmail.com²,
restuzebua06@gmail.com³, Sylviaria0705@gmail.com⁴, yedizatrinta@gmail.com⁵

Accepted: 23 Januari 2023

Published: 25 Januari 2023

Abstract

The reform period became an era that was quite important for Indonesia because it was followed by rapid progress and development. During the reform period, there were several presidents who led this country with various characteristics and policies implemented for the betterment of the nation, including B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono. Currently the Indonesian government is being led by President Joko Widodo who is trusted by the public to lead Indonesia for two terms. This study aims to reveal various policies and characteristics of President Joko Widodo's leadership, especially in the fields of politics, law, socio-culture, economy, defense-security, and education. The method used in this research is the historical method and the source of the article is obtained through a literature study that is relevant to the topic raised. The results of the research show that President Joko Widodo's government has produced many positive results for the progress and development of Indonesia, especially during the current reformation period.

Keywords: *Policy, President, Indonesia*

How to Cite: Sari. D. R., Anggriani. R., Zebua. R., Pasaribu. S. M., Saputrinta. Y. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (125-134).

*Corresponding author:
yedizatrinta@gmail.com

ISSN 2085-482X(Print)
ISSN 2407-7429(Online)

INTRODUCTION

Sebagaimana yang kita semua ketahui saat ini Indonesia berada pada era reformasi yang merupakan salah satu era baru bagi peradaban bangsa yang menunjukkan perubahan dan kemajuan diberbagai bidang. Reformasi ini sendiri sejatinya bertujuan untuk menata kembali ataupun mengubah sistem pemerintahan negara di masa sebelumnya Indonesia berada pada masa Orde Baru.

Adapun reformasi ini sendiri ditandai dengan adanya demokratisasi di segala bidang yang menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat sudah dapat menyatakan pendapat secara bebas, adanya kebebasan pers, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta munculnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang juga dikenal dengan kebijakan Otonomi Daerah) yang dapat membuat pembangunan di setiap daerah menjadi lebih merata serta tidak terlalu bergantung secara penuh kepada pemerintah pusat dengan artian dapat mengurus daerahnya secara mandiri (Mudjiharto, 2013).

Dalam perjalanannya, sudah ada beberapa presiden yang menjabat pada masa reformasi. Dimulai dari Presiden ketiga B.J Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto setelah lengser dari jabatan sebelum masa baktinya selesai dan sekaligus menandai beliau sebagai presiden masa reformasi pertama. Beberapa kebijakan yang menjadi fokus utama pada masa kepemimpinannya adalah reformasi ekonomi, pemulihan legitimasi politik, kebebasan pers, penegakan HAM dan Referendum Timor Timur yang merupakan salah satu kebijakan kontroversial sekaligus berisiko yang harus diambil oleh B.J Habibie selaku pemimpin negara pada saat itu (Pratama, 2020 : 235).

Tampak pemerintahan kepresidenan kemudian diteruskan oleh Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur yang terpilih melalui Pemilihan Umum 1999 dan sekaligus menandakan bahwasanya Abdurrahman Wahid merupakan Presiden keempat Indonesia. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sejatinya masih diliputi dengan maraknya berbagai konflik dan kerusuhan yang meresahkan sekaligus membahayakan seperti munculnya gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, kerusuhan antar agama. Adapun dialog merupakan solusi

yang diberikan serta ditawarkan oleh pemerintah, selain itu kebijakan lainnya yang dilakukan adalah pemisahan militer dan ABRI (Pratama, 2020 : 235).

Selanjutnya, pemerintahan presiden dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima yang juga merupakan anak dari bapak proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno. Beberapa kebijakan yang dibuat selama pemerintahan ini adalah pembentukan kabinet gotong royong, pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Privatisasi BUMN, dan Penundaan pembayaran utang luar negeri (Pratama, 2020 : 235-236).

Kepemimpinan presiden era reformasi selanjutnya diteruskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden keenam yang dijalani selama dua periode jabatan yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Pada masa pemerintahan ini, kebijakan yang dihasilkan dan berlaku yaitu dibentuknya Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari jilid I (2004-2009) dan jilid II (2009-2014), kebijakan konversi minyak tanah menjadi gas, pelunasan utang kepada IMF (International Monetary Fund), Perdamaian dengan Separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Perjanjian Helsinki yang dilaksanakan di Finlandia pada tahun 2005, 3 pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, diberlakukannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 (Pratama, 2020 : 236).

Presiden Joko Widodo lahir pada 21 Juli 1961. Sebelum terjun ke dunia politik, Joko Widodo dikenal sebagai salah seorang pebisnis mebel yang sukses. Karier politiknya dimulai ketika beliau mencalonkan diri sebagai walikota Solo pada tahun 2005 dibawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didukung oleh sejumlah partai koalisi dan hasilnya beliau terpilih menjadi walikota Solo dan menjabat hingga tahun 2012. Saat menjabat sebagai walikota, Joko Widodo dikenal masyarakat sebagai pejabat yang memiliki karakteristik kepemimpinan berupa blusukan yang berarti senang bertemu secara langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai aspirasi serta keluh kesah mereka dan hal ini juga berlaku saat ia menjabat sebagai gubernur bahkan presiden (Zaman, 2020).

Setelah masa jabatannya sebagai walikota selesai, beliau juga kembali maju

dalam pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta di tahun yang sama setelah masa jabatan walikotanya usai. Ia turut menggandeng Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur dan masing-masing didukung oleh partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung Joko Widodo sementara Partai Gerindra mendukung Basuki Tjahaja Purnama. Kedua pasangan tersebut pada akhirnya memenangkan pemilihan umum tersebut dan dipercaya untuk memimpin Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.

Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia dikenal sebagai salah satu presiden yang banyak membangun infrastruktur terlebih lagi sampai ke wilayah terluar Indonesia dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam berbagai sektor.

METHODOLOGY

Metode penelitian ini adalah metode sejarah yang mencakup empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan eksplanasi. Adapun sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini semuanya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diangkat. Dengan data dan informasi yang diperoleh maka diharapkan akan menghasilkan tulisan yang komprehensif sesuai dengan topik yang diangkat.

RESULT AND DISCUSSION

1. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang Politik.

Bidang Politik Berdasarkan laporan Lima Tahun Maju Bersama yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019, selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi-JK meraih beberapa capaian di bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri yang sama dengan program Nawacita pada poin kesatu, yaitu mendatangkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan juga memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Adapun penjelasan mengenai beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan Jokowi-JK sebagai berikut :

a. Politik Dalam Negeri

Pada buku Lima Tahun Maju Bersama yang telah dirilis kantor staf Presiden republik Indonesia diketahui, selama lima tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan di bidang politik. Dalam hal stabilitas politik dalam negeri, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus menjaga dengan mewujudkan rasa aman serta memastikan ruang dialog untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi.

Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), kehidupan demokrasi Indonesia yang diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi terus berada di posisi stabil (Pakazani dan Nabilla, 2020: 105). Dalam tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia tertulis berada pada 73,04 poin. Sementara pada 2015 berada pada 72,82 poin. Pada 2016 IDI ada pada 70,09 poin, 2017 pada 72,11 poin dan 2018 berada pada 72,39 poin. Menurut pemerintah, fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia ini berada diposisi seimbang (Pakazani dan Nabilla, 2020: 105). Sebagai sebuah gambaran, penting dilihat salah satu indikator kualitas demokrasi yakni partisipasi publik dalam pemilihan umum.

b. Politik Luar Negeri

Menurut Situmorang (2015: 69), kebijakan luar negeri Jokowi berorientasi ke (inward-looking). Hal ini dapat terlihat dari prinsip politik luar negeri yang dianut selama ini, yakni prinsip bebas-aktif. Prinsip ini membuka ruang bebas bagi interpretasi dan pemaknaan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Ini dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni "terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Pada visi ini mempertegas makna "kebebasan" Negara Indonesia pada cara melaksanakan kekuasaan, kemandirian, dan kepribadian nasional. Di dalamnya juga termaksud sikap dan sifat "aktif" untuk dapat merealisasikan kemandirian nasional atas landasan kerjasama positif dan konstruktif yakni gotong-royong.

Menurut Situmorang (2015: 70), prinsip "bebas-aktif" dari politik luar negeri

Indonesia sering bermakna ganda. Pertama, yaitu politik mancanegara Indonesia bermaksud guna memelihara identitas nasional. Makna kedua dari prinsip “bebas aktif” ialah bahwa politik luar negeri ditujukan pula untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dicantumkan di dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Atas dasar asas politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi, juga dapat dikatakan bahwa misi atau tujuan politik luar negeri Jokowi-JK selaras. Tujuan tersebut menurut Situmorang (2015:71) adalah:

- 1) Mengutamakan jati diri sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional;
- 2) Meluaskan peran global melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia;
- 3) Memperluas mandala keterlibatan regional di Indo-Pasifik, dan;
- 4) Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan keterlibatan masyarakat.

Dalam tataran operasionalnya ditetapkan 4 (empat) prioritas politik luar negeri semasa 6 kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi-Kalla yaitu:

- 1) Menjaga Kedaulatan NKRI
- 2) Melindungi WNI dan Badan Hukum Indonesia-BHI di luar negeri
- 3) Meningkatkan Diplomasi Ekonomi
- 4) Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional. (Mohsin, 2019).

Dalam usaha menjaga kedaulatan NKRI, sepanjang tahun 2017 telah dilakukan beberapa kali perundingan perbatasan yang meliputi 11 kali pertemuan penetapan batas maritim, 19 kali pertemuan demarkasi batas darat, dan 5 kali pertemuan Utusan Khusus Presiden RI dan Utusan Khusus PM Malaysia, membicarakan masalah perbatasan darat dan laut antara kedua negara, dan penandatanganan MoU on Survey and Demarcation of the Internasional Boundry antara Indonesia dan Malaysia (Mohsin, 2019). Mengenai usaha perlindungan WNI dan

BHI di Luar negeri, selama tahun 2017 Kemlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri telah menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri, dan membebaskan 14 WNI dari ancaman hokum mati, memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya pekerja migran yang menghadapi situasi rentan di luar negeri, membebaskan 2 orang sandera di Filipina Selatan (Mohsin, 2019). Sekarang telah terbentuk Data base WNI di luar negeri yang terintegrasi penuh dengan data base nasionallainnya.

Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang Hukum

Sesuai misi pemerintahan Jokowi-JK menekankan keinginan dalam “Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum”. Misi tersebut selanjutnya diejawantahkan dengan agenda strategis melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (agenda ke-4 Nawacita) (Radjab, 2018: 163). Agenda itu kemudian diturunkan ke dalam 42 prioritas utama yang menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian di bidang politik, 42 prioritas utama itu mencakup pembaruan sistem penegakan hukum, perlindungan kelompok marjinal serta penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM (Radjab, 2018: 164).

Di bidang hukum, pemerintah mencatatkan 6 capaian penting selama periode pemerintahan Jokowi-JK, yaitu:

- 1) Deregulasi peraturan daerah (perda) yang dicabut Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3.143 perda bermasalah.
- 2) Meningkatnya kinerja Polri dengan indikator penurunan angka kriminalitas dari 373.636 kasus pada tahun 2015 menjadi 165.147 kasus pada tahun 2016 (perJuni). Selain itu, terjadi penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas yang signifikan baik dari segi kasus maupun korban jiwa yaitu pada tahun 2015 mencapai 2.228 kasus dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1.947 kasus.
- 3)Kejaksanaan Agung berhasil menghemat keuangan negara Rp 14,2 triliun selama periode Januari hingga September 2016.
- 4) Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan adalah capaian penting keempat. Dalam program tax

amnesty, sejak Juli hingga Oktober uang tebusan telah mencapai Rp 97,15 triliun atau sebesar 60 persen dari target Rp 165 triliun.

- 5) Keberhasilan mengamankan dan memulangkan penjahat koruptor yakni Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina pada 14 April 2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 September 2015 dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016.
- 6) Pemerintah meluncurkan reformasi hukum nasional secara bertahap. Pada tahap pertama, pemerintah fokus menjalankan 5 program yaitu pemberantasan pungli, pemberantasan penyelundupan, percepatan pengurusan SIM, STNK, SKCK dan BPKB, relokasi lembaga pemasyarakatan dan peningkatan pelayanan hak paten, merek dan desain. Untuk mendukung program reformasi tahap pertama ini, pemerintah membentuk satuan tugas pemberantasan pungli (Satgas Saber Pungli) melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

2. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang Sosial-Budaya.

Pada masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintah mereka melakukan upaya dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Masa pemerintahan Jokowi-JK yang berakhir pada Minggu, 20 Oktober 2019 yang ditandai dengan adanya pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih dan Ma'aruf Amin sebagai wakil presiden terpilih sudah banyak capaian yang diraih yaitu :

a. Revolusi Karakter Bangsa

Selama lima tahun, Pemerintahan Jokowi-JK fokus melakukan revolusi karakter bangsa. Tanpa kehilangan individualitas, budaya bangsa harus tercermin dalam semua bidang kehidupan. Revolusi yang bersifat nasional akan dilakukan sesuai dengan perkembangan sektor fisik dan ekonomi yang akan dilanjutkan oleh pemerintah. Pemerintah mendorong kebangkitan fitrah manusia Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan prestasi bangsa sebagai salah satu pusat peradaban dunia, serta menghargai keberagaman di bidang sosial budaya sebagai prioritas.

Dalam buku Lima Tahun Maju Bersama Jokowi-JK yang diterbitkan oleh Kantor Kepresidenan RI, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum direncanakan. . jalan yang benar. IPM terus meningkat dari 68,9 pada tahun 2011, meningkat menjadi 69,95 pada tahun 2015 dan menjadi 70,18 pada tahun 2016, 70,81 menjadi pada tahun 2017 dan 71,39 pada tahun 2018.

Yang terpenting memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Asisten sosial Program-program yang dilaksanakan berhasil menurunkan angka kemiskinan. Menurut Statistik Finlandia (BPS), tingkat kemiskinan pada Maret 2019 adalah 9,1 persen dari total populasi, atau 25,1 juta orang, yaitu 0,25 poin persentase lebih sedikit dibandingkan September 2018 dan 0,1 poin persentase lebih sedikit dibandingkan Maret 2018. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah sejak tahun 1998. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 2,2 persen dari total penduduk. Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil dari pendekatan yang komprehensif, terutama melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tercatat (KIP) menerima 18,9 juta siswa, 10 juta keluarga penerima KKS dan 96,8 juta orang menjadi anggota KKS.

b. Pemberdayaan

Pemerintah juga tidak lupa memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui industri rumahan yang telah mencapai 3.76 operator. Menurut data BPS, Indeks Pembangunan Gender di Indonesia mencapai 90,99 persen pada tahun 2018, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender meningkat menjadi 72,10 pada tahun 2018 dari . dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 70,83. Anak sebagai generasi penerus juga tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah dengan pelaksanaan hak anak, salah satunya dengan terwujudnya 520 kabupaten/kota layak anak pada tahun 2018.

Di sisi lain, penyandang disabilitas bukan lagi sekedar objek, tetapi juga orang-orang dengan potensi pembangunan melalui partisipasi. Sejak tahun 2018, pemerintah

membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdikan pada negara melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Melalui PHK penyandang disabilitas berat mendapat bantuan hidup, yang jumlah penerimanya akan terus bertambah menjadi 101.378 pada tahun 2018. Pemerintah juga menawarkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Selain itu, ada program keuangan Mekar yang memiliki 5,3 juta nasabah. Pada 2019, penyaluran Mekar mencapai Rp12,75 triliun. Berdasarkan informasi dari Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, hingga tahun 2018 telah terdaftar 6.58 hak kekayaan intelektual di bidang iptek.

c. Indonesia Hijau

Mewujudkan Indonesia hijau merupakan salah satu tanggung jawab bersama pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Berdasarkan informasi Kementerian ESDM, total kapasitas produksi energi baru dan terbarukan meningkat menjadi .776 MW pada 2019. Atas nama Indonesia hijau, upaya juga dilakukan untuk mengurangi emisi dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik. Juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan BBM. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan hutan semakin baik, semakin berbasis tempat dan semakin dipercaya warga. Ditandai dengan laju penyusutan hutan yang menurun dan luas rehabilitasi hutan yang meningkat. Tercatat laju penyusutan hutan terus menurun mulai dari 1,89 juta hektare pada 2014-2015 menjadi 0,44 juta hektare pada 2017-2018. Seiring dengan itu juga dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang signifikan mencapai 375.750 hektare pada 2019 dibandingkan 2018 yang hanya 188.630 hektare.

Upaya menurunkan luas kebakaran hutan sejak tahun 2015 dilakukan secara bersama di tingkat tapak yang melibatkan aparat pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat. Upaya tersebut juga didukung dengan teknologi modifikasi cuaca dan water bombing. Sebanyak 415 posko pencegahan kebakaran hutan dan lahan didirikan, 50 unit pesawat ikut dalam operasi pemadaman karhutla dan lebih dari dua juta liter water

bombing serta 162,4 ton garam disemai untuk modifikasi cuaca. Pemerintah juga memberikan akses pengelolaan lahan kepada masyarakat yang kurang mampu lewat perhutanan sosial.

Presiden Joko Widodo berbicara kepada seniman dan budayawan di Kongres Kebudayaan 2018, menyatakan keprihatinannya terhadap perkembangan budaya yang semakin kompleks. Ia mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak ikut serta dalam pembangunan budaya dan kemudian melupakan nilai-nilai dasar Indonesia (Kumparan, 2021). Presiden ketujuh Indonesia itu pun sedih dengan tantangan budaya yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan budaya di dunia dipicu oleh perkembangan teknologi dan transportasi yang memungkinkan manusia berpindah dengan mudah dan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Menurut mantan pengusaha mebel tersebut, perkembangan teknologi, menyebabkan cepatnya mobilitas kata, video, hingga gambar.

Fenomena tersebut menurutnya membuat lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks. Baik itu berupa interaksi antar kelompok maupun antar bangsa. Interaksi antar kearifan, termasuk interaksi antara yang lama dan yang baru. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan, perkembangan budaya juga memicu potensi gesekan yang besar. Maka ia berpesan masyarakat Indonesia wajib menjaga budaya asli yang berakar pada persatuan kesatuan serta toleransi (Kumparan, 2021). Di samping tantangan budaya bangsa yang disampaikan Presiden Jokowi di atas, sebetulnya menurut Saiman (2019) dalam tulisannya yang berjudul Tantangan Budaya Nasionalisme di era globalisasi, budaya bangsa merupakan milik bangsa Indonesia yang harus dijaga, apalagi di era globalisasi ini.

Saiman (2009) menyatakan dalam tulisannya bahwa kebudayaan nasional merupakan bagian penting dari negara Indonesia yang dapat dikembangkan dan dikelola sebaik mungkin. Menurutnya, yang penting bisa digarap lebih luas lagi, tidak hanya warisan atau adat istiadat bangsa Indonesia yang dirayakan atau digenapi pada saat Hari Sumpah Pemuda atau peringatan Hari Pahlawan. Saiman (2009) menambahkan bahwa kebudayaan nasional harus menjadi bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan devisa bagi masyarakat

dan negara. Terakhir, beliau mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia harus menerapkan kesadaran budaya bangsa dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

d. Kanal Indonesia Perkuat dan Promosikan Budaya Bangsa

Melihat kepedulian Presiden dan peluang melestarikan budaya, seperti yang tertuang dalam tulisan Saiman di atas (2009), untuk pertama kalinya dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di Indonesia, Kemendikbud, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikbud) memperkenalkan saluran media budaya khusus yang disebut Bahasa Indonesia. Saluran media ini bertujuan untuk mengadaptasi, mengintegrasikan, dan mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia. Kanal Indonesia tampil sebagai salah satu episode Merdeka Belajar ke-13 bertajuk "Bebas Berbudaya dengan Kanal Indonesia". Saluran ini dapat diakses melalui indonesia.tv, Indihome Network TV 200 (SD) dan 916 (HD) serta melalui Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok kanal Indonesiana TV (Kemendikbudristek, 2021).

Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, saluran Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi kemajuan budaya, yaitu Indonesia bahagia berlandaskan keragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Bahkan, menurut Menteri Milenium tersebut, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang memiliki Indeks Pembangunan Budaya (IPK) yang mengukur perkembangan budaya. Aspek yang dinilai dalam pengukuran IPK meliputi warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, ekonomi budaya, gender, budaya literasi dan ekspresi budaya.

3. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang Ekonomi.

Pada era pemerintahan Joko Widodo pemerintah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi pemerintahan untuk memperkuat transaksi berjalan, berikut empat paket tersebut:

a. Kebijakan Insentif Pajak

1) Perusahaan yang menciptakan

lapangan kerja, menggunakan konten lokal, produk berorientasi ekspor, serta melakukan penelitian dan pengembangan bisa mendapatkan *tax allowance*.

2) Perusahaan yang membayar dividen dapat menerima insentif tambahan, seperti keringanan pajak atau imbalan finansial. Manfaat ini sangat membantu bagi perusahaan yang memilih untuk menginvestasikan kembali keuntungan mereka.

3) Pembebasan pajak pertambahan nilai mendorong bisnis di sektor logistik, seperti galangan kapal, peralatan yang digunakan dalam industri kereta api, dan transportasi udara.

b. Perlindungan Produk Dalam Negeri

1) Pemerintah memberlakukan tarif sementara pada produk impor untuk mencoba melindungi industri dari persaingan tidak sehat.

2) Mengajukan letter of credit untuk sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas, dan CPO.

3) Pemerintah membentuk perusahaan reasuransi BUMN untuk membantu merestrukturisasi dan merevitalisasi industri reasuransi dalam negeri. Perusahaan ini menggabungkan dua perusahaan reasuransi yang lebih kecil, yang menjadikannya perusahaan nasional.

c. Bebas visa kunjungan singkat wisatawan dari 30 negara.

d. Wajib menggunakan biofuel hingga dengan 15%

4. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang Pertahanan-Keamanan.

Salah satu wujud nyata dari kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dibidang pertahanan-keamanan adalah dengan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dengan visi menjadi Poros Maritim Dunia. Momentum bangkitnya kekuatan Asia ditangkap oleh Indonesia untuk mewujudkan kembali menjelaskan tentang usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuatan dan pertahanan nasional dari modernisasi atau peningkatan kekuatan negara luar yang dianggap sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman. Keseimbangan kekuatan (*balance of power*) sejatinya selalu diciptakan

sehingga tidak adanya satu negara yang lebih mendominasi (Permatasari,2022).

Sejatinya hal yang melatar belakangi upaya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI disebabkan oleh dua faktor, baik eksternal dan internal. Adapun faktor yang berasal dari luar adalah dengan adanya ancaman yang membahayakan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berupa kebangkitan China, Laut China Selatan yang menjadi sengketa, Kapal China di Perairan Natuna yang mengambil sumber daya laut Indonesia sekaligus menjadi ancaman berbahaya bagi Indonesia, persaingan modernisasi alutsista negara sebagai dinamika pertahanan dan keamanan Indonesia. Jokowi berusaha melindungi kedaulatan Indonesia dengan membeli alutsista baru dari luar.

Hal ini sebagai respon terhadap ancaman dari luar dan modernisasi alutsista oleh negara lain. Prioritas kebijakan pertahanan era Jokowi dari 2020, berupa Kerja sama dengan militer Amerika Serikat, Korea Selatan dan Australia dalam kebijakan pertahanan menjaga kedaulatan Indonesia, kerjasama modernisasi alat alutsista Indonesia dari negara-negara luar (dalam hal ini Amerika Serikat dan Korea Selatan) dan industri dalam negeri (PT PAL, PT Dirgantara) yang merupakan suatu upaya pemenuhan MEF (Minimum Essential Force) guna pertahanan kedaulatan yang dilakukan oleh Joko Widodo (Permatasari, 2022).

5. Kebijakan Presiden Joko Widodo Bidang Pendidikan.

Dalam bidang Pendidikan, Presiden Joko Widodo menghasilkan beberapa kebijakan yang memberi perkembangan dalam dunia Pendidikan, yaitu sebagai berikut :

a. Program Indonesia Pintar

Program ini adalah salah satu pemikiran dari program yang dilaksanakan pada pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla yang bertujuan agar mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Arahan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang mendelegasikan yaitu suatu Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kelanjutan dari program bantuan siswa miskin. Dan program PIP ini juga mempunyai tujuan agar nantiya dapat memberikan bantuan secara tunai pada pelajar yang kurang mampu

dalam mendanai Uang sekolah, dan tidak putus (Ismayani,2019).

b. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Program Pembinaan Karakter (PPK) adalah program pendidikan sekolah yang memperkuat karakter peserta didik melalui penyalarsan hati, rasa, akal budi dan olah raga, mendukung peran serta masyarakat dan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat yang tergabung dalam gerakan nasional. Urgensi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Revolusi Mental (GNRM) adalah:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia merupakan pondasi pembangunan bangsa.
- 2) Keterampilan yang dibutuhkan peserta didik abad 21 kualitas karakter, literasi dasar dan kompetensi 4C untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi Generasi Emas 2045.
- 3) Kecenderungan kemerosotan moral, etika dan budi pekerti.

Tujuan program pendidikan karakter adalah mendorong secara masif dan efektif nilai-nilai pembentukan karakter bangsa pada peserta didik melalui lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pemahaman dan pengamalan. , sehingga pendidikan karakter benar-benar dapat mengubah perilaku, pola pikir dan tindakan seluruh masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan jujur (Khotimah, 2019).

c. Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Untuk meningkatkan kualitas dan sumber dayamasyarakat, Presiden mengeluarkan arahan atau Inpres No. 9 Tahun 2016, yang di dalamnya memuat tentang revitalisasi sekolah kejuruan (pendidikan Mekkah), atau pendidikan vokasi. Program revitalisasi SMK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pendidikan vokasi di sekolah kejuruan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang lebih berdaya saing baik secara nasional maupun global. Inti dari program ini adalah sekolah memiliki keunggulan dan sumber daya berdasarkan potensi daerah untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dunia kerja industri untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah.

Revitalisasi pendidikan kejuruan yaitu sekolah menengah kejuruan diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sekolah kejuruan serta kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan yang akan menjadi sumber pembangunan Indonesia (Wening, 2017).

Pelaksanaan revitalisasi pendidikan kejuruan mengacu pada rencana revitalisasi SMK yang didefinisikan dengan beberapa aspek program yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu SMK sehingga berperan dalam peningkatan kualifikasi SMK. berkualitas dan sumber daya manusia yang produktif. Revitalisasi fokus pada isu-isu strategis yang meliputi harmonisasi kurikulum (termasuk inovasi mata kuliah), peningkatan kualitas guru dan dosen produktif, standarisasi sarana dan prasarana, penguatan dan perluasan kerjasama dengan perusahaan/industri. dunia (DU/DI) dan tata kelola dan organisasi kelembagaan (Wening, 2017).

d. Kebijakan Zonasi Sekolah

Kebijakan zonasi merupakan kebijakan OSIS yang mulai berlaku pada tahun pelajaran 2017/2018. Fokus utama kebijakan zonasi adalah akses yang sama ke layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, pemerataan kualitas pendidikan juga menjadi salah satu isu yang diimplementasikan. Sesuai kebijakan yang diterbitkan, Mendikbud menginginkan semua sekolah menjadi sekolah favorit. Dengan kata lain, kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi pemerataan pendidikan yang berdampak pada dua dimensi, yaitu pemerataan dan inklusi (Pradewi, 2019).

CONCLUSION

Presiden Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin negara yang memerintah Indonesia pada masa reformasi telah banyak menghasilkan kebijakan yang demokratis, menjangkau setiap lapisan kehidupan masyarakat Indonesia, dan selalu mengusahakan agar Indonesia nantinya menjadi negara yang kuat, berkarakter, dan sejahtera.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya sejumlah kebijakan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, dalam bidang politik beliau

menjamin kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia serta dengan adanya politik “bebas- aktif” semakin membuka keterlibatan peran Indonesia dalam kemajuan dan perdamaian Indonesia maupun Dunia serta terjaminnya keselamatan serta keamanan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Kedua, jika dilihat ataupun ditinjau dari aspek hukum dapat dikatakan keamanan sudah semakin membaik serta penegakan hukum di Tanah Air sudah semakin berkembang ke arah kemajuan.

Ketiga, sosial-budaya yang merupakan salah satu aspek pembentuk jati diri serta identitas bangsa semakin dilestarikan dan terditingkatkan,

Keempat, perekonomian Indonesia saat dipimpin oleh pemerintahan Joko Widodo maju dengan pesat dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Kelima, bidang pertahanan-keamanan Indonesia semakin diakui dan dipandang oleh berbagai negara.

Keenam, inovasi serta kebijakan pada dunia pendidikan semakin merangkul masyarakat dari berbagai golongan dan menjaditidak ada perbedaan. Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi semakin meningkat berkat sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadikan setiap individu memiliki karakter, akhlak, kepribadian, serta berwawasan yang baik berdasarkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan yang dilakukan sangat sesuai dengan era reformasi pada saat ini.

REFERENCES

- Brown, S. (1997). *Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forest*. FAO Forestry Paper 134. FAO, Rome. Cited in [http://cdm.unfccc.int/Panels/ar._____\[17](http://cdm.unfccc.int/Panels/ar._____[17) September 2007]
- Desi. 2019. *Capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pemerintahan Jokowi-JK*. <https://www.antaraneews.com/berita/1119618/capaian-pembangunan-manusiadan-kebudayaan-pemerintahan-jokowijk>
- Farida, Ida. *2 Tahun Jokowi-Ma'ruf kuatkan Budaya Bangsa*. Dikutip dari <https://kumparan.com/ida-farida1601020955847857967/2->

- [tahunjokowi-maruf-kuatkan-budaya-bangsa1wvCVzvyZof](#) [27 November 2022]
- Ismayani, Maya Sri, dkk. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4 (1), 38-45.
- Khotimah, Desy Nurlaida. (2019). Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Melalui Kegiatan 5s di Sekolah Dasar. *Inopendas Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2 (1), 28-31.
- Mohsin, A. (2019). Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Lampau, Kini dan Masa Depan: Suatu Tinjauan dan Saran Kedepan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41 (62).
- Mudjiharto. (2013). Menyimak Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara RI Era Reformasi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5 (1), 7-11.
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2015). Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya. *Jurnal Politica*, 6 (2), 167-190.
- Pakazeni, I., & Nabilla, C. (2020). Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi. *The Journalish: Social and Government*, 1 (3), 100-109.
- Permatasari, Yuni. (2022). Motif Prioritas Kebijakan Pertahanan Era Jokowi Dalam Mempertahankan Kedaulatan Nkri Tahun 2014 -2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7 (2), 22-28.
- Pradewi, Gunarti Ika, Rukiyati. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4 (1), 28-34.
- Prasodjo, Darmawan. 2020. *Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, Rinaldo Adi, Yusuf Perdana. 2022. *Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi*. Klaten : Penerbit Lakeisha.
- Radjab, S. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Politik Profetik*, 6 (2), 151-172.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11 (1).
- Sugianto, S. (2019). Problematika Penegakan Hukum Dan Nawacita Jokowi-Jk Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Di Indonesia. *Yustitia*, 5 (1), 90-107.
- Wening, Sri. (2017). Revitalisasi Pendidikan Vokasi Melalui Inovasi Sistem Penilaian Berbasis Kecakapan Abad Ke-21. *Prosiding Pendidikan Teknik Tata Boga FT UNY*.
- Zaman, Ali Noer. (2020). Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, 1 (1), 56-70.